

Implementasi Program Mutu Pendidikan Dalam Meningkatkan Budaya Akademik di Madrasah Aliyah Sunan Pandanaran (MASPA) Sardonoharjo Ngaglik Sleman DIY

Sri Haningsih¹

Abstract

The current paper aims at studying the implementation of quality assurance program at Madrasah Aliyah Sunan Pandanaran (MASPA) Sardonoharjo Ngaglik Sleman DIY. The quality assurance program run by MASPA is designed to give feedback to improve its academic quality. The subjects of the research are teachers and MASPA head of school. Using qualitative approach with observation and in-depth interview as data collection method, this study found that there is a moderate improvement on academic culture at MASPA, particularly on: 1) student presence level increases 90%; 2) the increase of Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) fulfillment; 3) teachers presence level increases 90%; and d) better percentage of study completion of student.

Keywords: quality assurance, academic culture

¹ Penulis adalah dosen tetap Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam UII

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Demikian juga halnya bagi peradaban sebuah bangsa. Maju tidaknya suatu bangsa sangat tergantung pada pendidikan bangsa tersebut. Pendidikan suatu bangsa yang maju dapat menghasilkan manusia yang berkualitas, baik dari aspek intelektualitas maupun perilaku. Sebaliknya jika pendidikan suatu bangsa mengalami stagnasi maka bangsa itu akan terbelakang di segala bidang. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sumber daya manusia memiliki peran penting dalam membangun bangsa di berbagai sektor kehidupan.

Kualitas sumber daya manusia yang baik selanjutnya juga akan mempengaruhi mutu pendidikan. Karena itu, pembentukan lembaga

pendidikan yang bermutu bukan hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi tanggungjawab semua civitas akademika yang terlibat di dalam kegiatan pendidikan. Arcaro menyebutkan bahwa terdapat lima karakteristik sekolah yang bermutu, yaitu: (1) fokus pada pelanggan, (2) keterlibatan total, (3) pengukuran yang tepat, (4) komitmen, dan (5) perbaikan berkelanjutan (dalam Wiratno, 2007: 14-15).

Mutu produk pendidikan akan dipengaruhi oleh seberapa besar lembaga pendidikan mampu mengelola seluruh potensi secara optimal mulai dari tenaga kependidikan, peserta didik, proses pembelajaran, sarana pendidikan, keuangan dan interaksi sosial. Di Indonesia terdapat dua lembaga pendidikan yaitu lembaga pendidikan umum dan lembaga

pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam seringkali dianggap terbelakang dan kurang maju. Karena itu, lembaga pendidikan Islam perlu merubah paradigma pendidikan konservatif menuju paradigma baru pendidikan yang berorientasi pada sistem penjaminan mutu semua aktivitas civitas akademika.

Unsur dasar yang mempengaruhi suatu mutu yaitu (1) manusia, (2) metode, (3) alat, (4) bahan, (5) ukuran, (6) evaluasi berkelanjutan. Badan Nasional Serifikasi Profesi (BNSP) juga memaparkan bahwa penerapan standar mutu meliputi delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yaitu (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar kompetensi lulusan, (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian pendidikan. Delapan standar tersebut sebagai penentu mutu pendidikan suatu lembaga pendidikan.

Pra survey peneliti di Madrasah Aliyah Sunan Pandanaran (MASPA) memberikan gambaran bahwa proses pembelajaran di MASPA dapat dikatakan belum optimal dan masih jauh dari standar mutu. Baik dari segi tata kelola, tenaga kependidikan, tenaga pendidik, kompetensi lulusan dan lain sebagainya. Secara rinci, kondisi mutu pendidikan di MASPA saat ini sangat membutuhkan perbaikan berkesinambungan. Permasalahan yang dihadapi bukan saja permasalahan rutin administrasi, melainkan kemampuan keterampilan manajerial pimpinan lembaga pendidikan, perubahan perilaku dan pola kepemimpinan lembaga pendidikan, rendahnya partisipasi dan tanggung jawab secara komprehensif tenaga pendidik dan kependidikan. Kondisi ini dikhawatirkan menjadi penghambat pengembangan mutu di MASPA.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan evaluasi standar mutu yang diterapkan di MASPA dengan harapan standar mutu pendidikan di MASPA menjadi lebih baik dan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

B. Pembahasan

1. Telaah Pustaka

Kajian sistem penjaminan mutu bukanlah hal baru dalam dunia pendidikan. Karena itu, penulis mengidentifikasi beberapa kajian terkait sistem penjaminan mutu. Berdasarkan hasil telaah pustaka, peneliti menemukan bahwa penelitian mengenai penjaminan mutu ini paling tidak terdapat tiga kajian. Kajian pertama, yaitu asal mula program mutu. Program mutu berasal dari dunia bisnis. Dalam dunia bisnis, baik yang bersifat produksi maupun jasa, program mutu merupakan program utama, sebab kelanggengan dan kemajuan usaha ditentukan oleh mutu dan tuntutan pengguna. Permintaan dan tuntutan pengguna terhadap produk dan jasa layanan terus berubah dan berkembang. Sejalan dengan hal itu, mutu bukan hanya menjadi masalah dan kepedulian dalam bidang bisnis, melainkan juga dalam bidang-bidang lainnya, seperti pemerintahan, layanan sosial, dan pendidikan.

Kajian yang kedua, yaitu kajian mutu pendidikan yang terkait dengan mutu lulusan, mutu pengajaran, bimbingan dan latihan dari guru, serta mutu profesionalisme. Mutu tersebut terkait dengan mutu manajerial para pimpinan pendidikan. Keterbatasan dana, sarana prasarana, fasilitas pendidikan, media, sumber belajar, dan lingkungan pendidikan merupakan faktor penting dalam mempengaruhi kualitas mutu pendidikan. Kelemahan mutu pendidikan berpengaruh pada tinggi rendahnya mutu lulusan. Sebab itu, mutu pen-

didikan menjadi hal penting dalam pengembangan sumber daya manusia, khususnya di lembaga pendidikan.

Mutu lulusan yang rendah dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti lulusan tidak dapat melanjutkan studi, tidak dapat menyelesaikan studinya pada jenjang yang lebih tinggi, tidak dapat bekerja, diterima bekerja tetapi tidak berprestasi, tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat, dan tidak produktif. Lulusan yang tidak produktif akan menjadi beban masyarakat, menambah biaya kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, serta memungkinkan menjadi warga yang tersisih dari masyarakat. Karena itu, mutu sumber daya manusia sangat menentukan kemajuan peradaban suatu bangsa.

Kajian ketiga, yaitu kajian mutu pendidikan yang terkait dengan tantangan mutu pendidikan. Proses pendidikan yang bermutu harus didukung oleh personalia, seperti administrator, guru, konselor, dan tata usaha yang bermutu dan profesional. Hal tersebut didukung pula oleh sarana dan prasarana pendidikan, fasilitas, media, serta sumber belajar yang memadai, baik kualitas maupun kuantitasnya, dan biaya yang mencukupi, manajemen yang tepat, serta lingkungan yang mendukung. Mutu pendidikan bersifat menyeluruh, menyangkut semua komponen, pelaksana, dan kegiatan pendidikan, atau disebut sebagai mutu total (*total quality*). Kajian-kajian di atas merupakan kajian yang ditemukan oleh penulis dalam telaah pustaka dalam penelitian ini meskipun tidak menutup kemungkinan masih ada kajian-kajian lain yang belum ditemukan oleh penulis.

2. Konsep Penjaminan Mutu Pendidikan

2.1. Pengertian Sistem Penjaminan Mutu

Mutu pendidikan adalah suatu pelayanan tentang keunggulan hasil kerja ditinjau dari segi input, proses, output, dampak maupun manfaat yang dapat ditingkatkan melalui manajemen. Untuk itu dibutuhkan upaya untuk mencapai mutu pendidikan, seperti:

- 1) Merancang berbagai tujuan pengembangan siswa dan layanan pendidikan.
- 2) Mengedepankan kualitas sekolah
- 3) Guru yang berpengalaman dalam pembelajaran.
- 4) Menjalin kerja sama dengan pihak lain
- 5) Mengevaluasi dan mencari terobosan baru untuk meningkatkan mutu dan produktivitas.

Sistem penjaminan mutu merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan melalui sub sistem yang masing-masing merupakan sistem pula. Sistem tersebut meliputi sistem penjaminan mutu internal, yaitu kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan oleh pihak internal yang ditunjuk untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan secara berkelanjutan (*continuous improvement*) sebagaimana diatur pasal 50 ayat (6) Undang-undang Sisdiknas Juncto pasal 91 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Secara umum dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah perencanaan, penerapan, pengendalian dan pengembangan standar mutu pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan (*continuous improvement*) sehingga *stakeholders*, baik internal maupun eksternal memperoleh kepuasan.

2.2. Tujuan dan Sasaran Sistem Penjaminan Mutu

Tujuannya adalah mensinergikan sistem penjaminan mutu internal dan sistem penjaminan mutu eksternal untuk memenuhi atau melampaui SNP sehingga mendorong upaya penjaminan mutu pendidikan yang berkelanjutan. Sedangkan sasarannya adalah terciptanya sinergi antara sistem penjaminan mutu internal dan sistem penjaminan mutu eksternal untuk memenuhi atau melampaui SNP sehingga mendorong upaya penjaminan mutu pendidikan yang berkelanjutan.

2.3. Dasar-Dasar Program Mutu Pendidikan

Untuk melaksanakan program mutu pendidikan diperlukan beberapa dasar yang kuat, yaitu sebagai berikut (Syaodih, 2006: 24):

- 1) Komitmen pada perubahan
- 2) Pemahaman yang jelas tentang kondisi yang ada
- 3) Mempunyai visi yang jelas terhadap masa depan
- 4) Mempunyai rencana yang jelas
- 3) Peningkatan mutu pendidikan harus dibentuk dengan melakukan loncatan-loncatan dan terobosan-terobosan.
- 4) Uang bukan kunci utama dalam usaha peningkatan mutu. Mutu pendidikan dapat diperbaiki jika administrator, guru, staf, pengawas dan pimpinan kantor mengembangkan sikap yang terpusat pada kepemimpinan, *team work*, kerja sama, dan akuntabilitas.
- 5) Kunci utama peningkatan mutu pendidikan adalah komitmen pada perubahan.
- 6) Banyak profesional di bidang pendidikan yang kurang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam menyiapkan para siswa memasuki pasar kerja yang bersifat global.
- 7) Program peningkatan mutu dalam bidang komersial tidak dapat dipakai secara langsung dalam pendidikan, tetapi membutuhkan penyesuaian-penyesuaian dan penyempurnaan.
- 8) Salah satu komponen kunci dalam program mutu adalah sistem pengukuran.
- 9) Masyarakat dan manajemen pendidikan harus menjauhkan diri dari kebiasaan menggunakan "program singkat", peningkatan mutu dapat dicapai melalui perubahan yang berkelanjutan tidak dengan program-program singkat.

2.4. Prinsip-Prinsip Peningkatan Mutu pendidikan

Beberapa prinsip yang perlu dipegang dalam menerapkan program mutu pendidikan di antaranya sebagai berikut:

- 1) Peningkatan mutu pendidikan menuntut kepemimpinan profesional dalam bidang pendidikan.
- 2) Kesulitan yang dihadapi para profesional pendidikan adalah ketidakmampuan mereka dalam menghadapi "kegagalan sistem" yang mencegah mereka dari pengembangan atau penerapan cara atau proses baru untuk memperbaiki mutu pendidikan yang ada.

2.5. Permasalahan Mutu pendidikan

Banyak masalah mutu dihadapi dalam dunia pendidikan, seperti mutu lulusan, mutu pengajaran, bimbingan dan latihan dari guru, serta mutu profesionalisme dan kinerja guru. Mutu-mutu tersebut terkait dengan mutu manajerial para pimpinan pendidikan, keterbatasan dana, sarana dan prasarana, fasilitas pendidikan, media, sumber belajar, alat dan bahan latihan, iklim sekolah, lingkungan pendidikan, serta dukungan dari pihak-pihak yang

terkait dengan pendidikan. Semua kelemahan mutu dari komponen-komponen pendidikan tersebut berujung pada rendahnya mutu lulusan.

Mutu lulusan yang rendah dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti lulusan tidak dapat melanjutkan studi, tidak dapat menyelesaikan studinya pada jenjang yang lebih tinggi, tidak dapat bekerja, tidak diterima di dunia kerja, diterima bekerja tetapi tidak berprestasi, tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat, dan tidak produktif. Lulusan yang tidak produktif akan menjadi beban masyarakat, menambah biaya kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, serta memungkinkan menjadi warga yang tersisih dari masyarakat (Syaodih, 2006: 27).

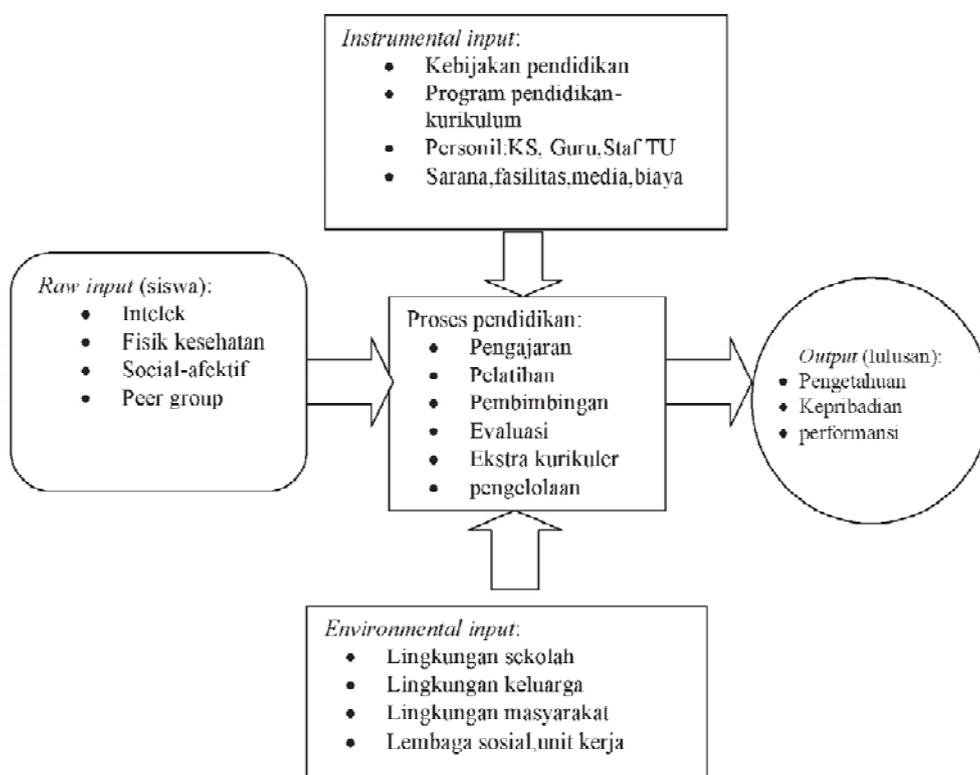
2.6. Tantangan dan Kebutuhan terhadap Pendidikan yang Bermutu

Revolusi informasi telah mengakibatkan dunia menjadi semakin terbuka, menghilangkan batas-batas geografis, administratif-yuridis, politis dan sosial-budaya. Masyarakat global, masyarakat teknologi, ataupun masyarakat informasi yang bersifat terbuka, berubah sangat cepat dalam memberikan tuntutan, tantangan, bahkan ancaman-ancaman baru. Pada abad sekarang ini, manusia-manusia dituntut berusaha tahu banyak (*knowing much*). Menjalinkan hubungan dan kerja sama dengan orang lain (*being sociable*), serta berusaha memegang teguh nilai-nilai moral (*being morally*). Manusia “unggul, bermoral, dan pekerja keras” inilah yang menjadi tuntutan dari masyarakat global. Manusia-manusia seperti ini akan mampu berkompetisi bukan saja dengan sesama warga dalam suatu daerah, wilayah, ataupun negara, melainkan juga dengan warga negara dan bangsa lainnya.

Dasar-dasar pengembangan manusia “unggul, bermoral, dan pekerja keras” diberikan di sekolah. Selanjutnya pengembangan berlangsung di masyarakat dan lingkungan-lingkungan pekerjaan. Sekolah tidak mampu mencetak manusia-manusia tersebut, tetapi memberikan landasan, dasar-dasar dan embrionya untuk dikembangkan lebih lanjut. Pengembangan manusia-manusia “unggul, bermoral, dan pekerja keras” berlangsung dalam proses yang lama, hampir sepanjang hayat, tetapi dasar-dasarnya diberikan dan dikembangkan dalam proses pendidikan terutama sekolah.

Sekolah menengah jenjang SLTP/ MTs dan SMU/ MA mempunyai peranan yang sangat penting dalam memberikan dasar-dasar bagi pengembangan manusia “unggul, bermoral, dan pekerja keras”. Berbeda dengan sekolah menengah kejuruan yang memberikan dasar-dasar bagi pengembangan kecakapan kerja, SLTP/ MTs dan SMU/ MA sendiri berperan memberikan keunggulan, moral, dan karakter pekerja keras pada bidang studi dan jenjangnya. Dengan demikian, para siswa SLTP/ MTs mampu mencapai keunggulan penguasaan pengetahuan dan kecakapan dalam bidang studi atau mata pelajaran yang dipelajarinya. Mereka tidak sekedar tahu atau kenal, tetapi mereka harus paham, cakap, mampu, serta mahir menggunakannya. Kecakapan dan kemahiran saja belum cukup sebab harus diikuti dengan motif, kemauan, semangat, dan tekad untuk menyatakannya. Apa artinya para siswa dapat melakukan sesuatu, tetapi tidak mau melakukannya? Kemahiran dan kemauan ini harus didasari oleh moral yang kuat. Artinya, siswa mahir dan mau mengerjakan hal-hal yang baik demi kebaikan. Baik bagi dirinya, orang lain maupun masyarakat pada umumnya.

Mutu pendidikan bersifat menyeluruh, menyangkut semua komponen, pelaksana, dan kegiatan pendidikan, atau disebut sebagai mutu menyeluruh atau *total quality*. Kegiatan pendidikan cukup kompleks, satu kegiatan, komponen, pelaku, waktu, terkait dan membutuhkan dukungan dari kegiatan, komponen, pelaku serta waktu lainnya. Faktor-faktor yang terlibat dalam pengembangan mutu pendidikan secara sistemik dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1:
Peta Komponen Pendidikan Sebagai Sistem
(Sukmadinata, 2006)

2.7. Peranan Program Mutu dalam Budaya Akademik

Budaya akademik yang baik akan berpengaruh positif terhadap mutu atau kualitas pendidikan. Sekolah yang memiliki

budaya akademik yang *excellent* dapat dipastikan mutu atau kualitas pendidikannya terjamin. Karena itu, budaya akademik dan mutu merupakan simbiosis mutualisme. Program mutu harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat membentuk budaya akademik yang *excellent*. Dari sini dapat diketahui bahwa mutu suatu sekolah akan terbangun dan berimplikasi pada budaya akademik sekolah tersebut sehingga dalam menentukan standar program mutu perlu kejelian dan ketelitian. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga kualitas budaya akademik yang akan dibangun.

2.8. Batasan Budaya Akademik Madrasah Aliyah

Pembangunan pendidikan Madrasah Aliyah yang terberat justru terletak pada membangun budaya akademik. Pembangunan budaya akademik tidak hanya membutuhkan dana materiil yang tidak sedikit, akan tetapi membutuhkan daya tahan kesabaran, keuletan, persistensi, dan

konsistensi dari seluruh pemangku kepentingan di sekolah yaitu guru, kepala sekolah, orangtua, dan pemerintah daerah. Kesatuan dari sikap tersebut akan menghasilkan budaya akademik yang *excellent*. Karena itu, budaya akademik merupakan mutiara kehidupan bagi setiap sekolah.

Budaya akademik memiliki ciri pada setiap tindakan, keputusan, kebijakan, dan opini yang didukung dengan dasar akademik yang kuat. Artinya merujuk pada teori, dasar hukum, dan nilai kebenaran yang teruji, bukan pada popularitas semata atau sangkaan yang tidak memiliki dasar empirik yang kuat. Ini berbeda dengan budaya politik atau dunia hiburan. Jadi guru, kepala sekolah, dan siswa selalu berpegang pada pijakan teoritik dalam berpikir, bersikap dan bertindak dalam kesehariannya. Budaya akademik tercermin pada kedisiplinan dalam bertindak, kearifan dalam bersikap, serta kepiawaian dalam berpikir dan berargumentasi.

Budaya akademik adalah bagian penting Madrasah Aliyah dalam mencapai mutu akademis yang baik. Definisi Budaya akademik tersebut terdiri dari (1) tumbuh keinginan semua pihak untuk maju, (2) tumbuh keyakinan atau pemahaman bahwa setiap orang yang tergabung dalam Madrasah Aliyah ini menjadi bagian penting (strategis) dari wajah (kemajuan) Madrasah Aliyah ini ke depan, (3) memahami ukuran-ukuran kemajuan dari setiap peran yang disandang oleh masing-masing warga Madrasah Aliyah, (4) dibangun komunikasi (*sillatullah*) akademik yang mantap sehingga melahirkan wacana atau suasana keilmuan di kalangan warga Madrasah Aliyah, (5) tumbuh rasa tanggung jawab atau amanah yang tinggi oleh semua pihak dalam mengembangkan lembaga pendidikan Islam ini, dan (6) memiliki semangat beramal shalih dan berjuang di jalan Allah lewat pengembangan ilmu pengetahuan.

2.9. Standar Kompetensi Lulusan Madrasah Aliyah Sunan Pandanaran (MASPA)

Sebagaimana disebutkan dalam rumusan Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan MASPA bahwa Standar Kompetensi Lulusan MASPA dirumuskan dalam beberapa hal penting. Diantaranya adalah:

- 1) Berperilaku sesuai dengan ajaran Islam.
- 2) Mengembangkan diri secara optimal dengan memanfaatkan kelebihan diri serta memperbaiki kekurangannya.
- 3) Menunjukkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab atas perilaku, perbuatan, dan pekerjaannya.
- 4) Berpartisipasi dalam penegakan aturan-aturan sosial.
- 5) Menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup lokal maupun global.
- 6) Membangun dan menerapkan informasi dan pengetahuan secara logis, kritis, kreatif, dan inovatif.
- 7) Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif dalam pengambilan keputusan.
- 8) Menunjukkan kemampuan mengembangkan budaya belajar untuk pemberdayaan diri.
- 9) Menunjukkan sikap kompetitif dan sportif untuk mendapatkan hasil yang terbaik.
- 10) Menunjukkan kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah kompleks dalam kehidupan.
- 11) Menunjukkan kemampuan menganalisis gejala alam dan sosial dalam masyarakat dan lingkungan sekitar.
- 12) Tetap menjaga dan memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab.
- 13) Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 14) Mengekspresikan kemampuan dirinya melalui kegiatan seni dan budaya.
- 15) Menghasilkan karya kreatif dan inovatif, baik individual maupun kelompok.
- 16) Membiasakan diri dengan pola hidup sehat, serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar.

- 17) Berkomunikasi lisan dan tulisan secara efektif dan santun.
- 18) Senantiasa bekerjasama dalam kelompok dan saling tolong-menolong.
- 19) Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan di masyarakat.
- 20) Menghargai adanya perbedaan pendapat dan berempati terhadap orang lain.
- 21) Menunjukkan keterampilan membaca dan menulis naskah secara sistematis dan estetis.
- 22) Menunjukkan keterampilan menyimak, membaca, menulis, dan berbicara dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan bahasa Arab.
- 23) Menguasai pengetahuan yang diperlukan untuk mengikuti pendidikan tinggi.

3. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Data yang diperoleh dari penelitian adalah data teramati (empiris) yang mempunyai kriteria tertentu yaitu valid (Subagyo, 1999: 2). Data yang valid sudah bisa dipastikan data yang obyektif. Berdasarkan fakta itulah metode penelitian sangat menentukan kualitas penelitian.

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada *quality* atau hal yang terpenting dari sifat suatu barang atau jasa. Penelitian kualitatif dapat didesain untuk memberikan sumbangannya terhadap teori, praktik, kebijakan, masalah-masalah sosial dan tindakan. Penelitian kualitatif merupakan model penelitian yang dikembangkan oleh madzhab Baden di mana penelitian tersebut menghendaki *natural setting* dalam penelitiannya. Secara sederhana penelitian kualitatif

dapat dikatakan sebagai penelitian di mana peneliti meneliti informan sebagai subjek penelitian dalam lingkungan hidup kesehariannya (Idrus, 2009: 23).

Penelitian kualitatif bersifat dinamis dan berkembang sesuai dengan kondisi keseharian subjek penelitian. Pernyataan tersebut membuat peneliti harus berjibaku untuk membedakan mana yang kegiatan basa-basi dan mana yang tidak. Sifat dari penelitian kualitatif adalah deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha memaparkan kondisi subjek penelitian sesuai dengan kondisi sebenarnya. Wajar jika analisis yang sering digunakan dalam penelitian ini adalah secara induktif (*discovery oriented*). Perlu dicatat juga, penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian yang bersifat evaluatif, artinya penelitian ini bersifat mengevaluasi kondisi subjek penelitian dan permasalahan yang ditetapkan jika diperlukan.

3.2. Subjek Penelitian

Subyek penelitian adalah subyek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Jika kita bicara tentang subyek, sebetulnya kita berbicara tentang unit analisis, yaitu subyek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran peneliti. Subjek penelitian adalah sesuatu, baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi), yang sifat-keadaannya akan diteliti. Dengan kata lain subjek penelitian adalah sesuatu yang di dalam dirinya melekat atau terkandung objek penelitian (Arikunto, 2002: 145).

1) Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Penelitian populasi dilakukan apabila peneliti ingin melihat liku-liku yang ada di dalam populasi sehingga subyek penelitiannya meliputi semua yang terdapat dalam populasi (Arikunto, 2002: 108). Sedangkan Subagyo (1999: 23), menjelaskan

bahwa populasi merupakan obyek penelitian yang menjadi sasaran untuk mendapatkan dan mengumpulkan data-data. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kepala MASPA Sardonoarjo Ngaglik Sleman DIY.
- b. Dewan Guru MASPA Sardonoarjo Ngaglik Sleman DIY.

2) Sampel

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *snowball sampling*. Sampling tersebut dimaksudkan untuk memperoleh data secara mendalam. Di samping itu, karakter sampling tersebut sesuai dengan karakter penelitian kualitatif.

3.3. Metode Pengumpulan Data

1) Metode Observasi Partisipan (*Participant Observation*)

Metode observasi adalah pengumpulan data melalui observasi terhadap objek pengamatan dengan langsung hidup bersama, merasakan serta berada dalam aktifitas kehidupan objek pengamatan. Dengan demikian, pengamat betul-betul menyelami kehidupan objek pengamatan dan bahkan tidak jarang pengamat kemudian mengambil bagian dalam kehidupan budaya mereka (Bungins, 2007: 115).

2) Metode Wawancara mendalam (*In-depth Interview*)

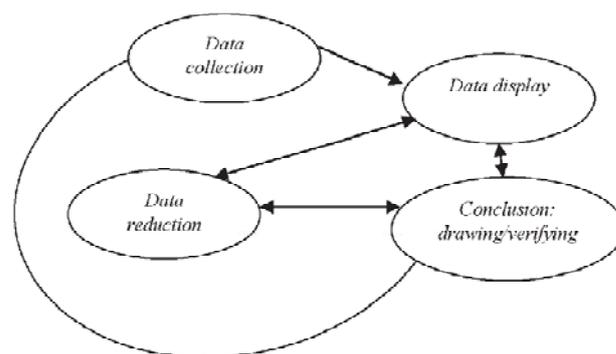
Wawancara mendalam (*in-depth interview*) secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, di mana pewawancara terlibat secara langsung. Dengan demikian, kekhasan dari wawancara mendalam adalah keterlibatannya

dalam kehidupan informan (Bungins, 2007: 108).

3.4. Metode Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Model analisis dari penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*). Analisis isi adalah suatu teknik analisis penelitian yang menjadikan penelitian menjadi obyektif, sistematis, deskriptif kuantitatif dari apa yang tampak dalam komunikasi. Analisis isi ditekankan pada bagaimana peneliti melihat kejelasan isi komunikasi secara kualitatif, bagaimana peneliti memaknakan isi komunikasi, membaca simbol-simbol, dan memaknakan isi interaksi simbolis yang terjadi dalam komunikasi (Bungins, 2007: 156).

Analisis yang akan peneliti perhatikan adalah karakter penerapan mutu madrasah untuk kemudian dibandingkan dan dicari alternatif model implementasi program mutu sekolah menengah/ madrasah. Berikut ini adalah skema analisis isi dengan menggunakan interaktif model seperti yang dipaparkan oleh Miles dan Huberman:



Gambar 2:
Skema Content Analysis with Interactive Model

Skema analisis dari penelitian ini diawali dengan memperhatikan secara seksama proses manajemen mutu yang diterapkan di MASPA Sardonoarjo Ngaglik Sleman Yogyakarta kemudian dilakukan perbaikan secara nyata

dalam pelaksanaan manajemen mutu yang diterapkan di MASPA.

4. Hasil Penelitian

4.1. Implementasi Program Mutu Pendidikan dalam Meningkatkan Budaya Akademik di Madrasah Aliyah Sunan Pandanaran.

Implementasi program mutu pendidikan di MASPA dilakukan sebagai berikut:

Pertama, evaluasi jangka pendek, evaluasi jangka menengah, dan evaluasi tahunan. Evaluasi tersebut dilakukan dengan membuat analisa-analisa proses pendidikan sampai dengan hasil. (Pasal 1 butir 21 UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 tentang evaluasi pendidikan).

Kedua, MASPA terakreditasi A sesuai dengan SK BAPS Provinsi DIY Nomor 12.1/BAP/TU/XI/2011 tanggal 12 November 2010 dengan Nilai 91 dan 90. Kondisi ini termasuk dalam kategori pasal 1 butir 22 UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 tentang akreditasi lembaga pendidikan.

Ketiga, pelaksanaan delapan standar nilai pendidikan di MASPA merupakan program unggulan madrasah. Pelaksanaan standar proses, standar isi dan standar kompetensi lulusan yang berkaitan langsung dengan proses pembelajaran diupayakan secara maksimal oleh MASPA agar proses pembelajaran dapat dilakukan dengan ideal. Misalnya buku administrasi dikumpulkan di awal tahun ajaran, rencana program pembelajaran (RPP) disesuaikan dengan kondisi *up to date* (varian dari RPP terus berkembang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan pembuat kebijakan).

Selanjutnya, pelaksanaan standar pendidik dan tenaga kependidikan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Sebab itu, penumpukan pendidik dan tenaga kependidikan tidak mungkin terjadi. Di samping itu, MASPA

mewujudkan standar pengelolaan dan pembiayaan dengan meningkatkan pelayanan kepada pelanggan pendidikan.

Ketersediaan data tentang siswa menjadi patokan optimalnya pelayanan madrasah. Baik itu melalui JIBAS, ASSIST, maupun EMIS. Ditambah lagi, implementasi standar penilaian di MASPA secara berkala dan terjadwal. Misalnya Ujian Tengah Semester, Ujian Semester, dan Ujian Akhir Nasional. Hasil penilaian dijadikan sebagai acuan pengambilan kebijakan pada periode berikutnya.

MASPA juga menerapkan standar sarana prasarana. Perihal tersebut diwujudkan dengan ketersediaan sarana belajar dan pembelajaran seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, taman baca, dan masjid di lingkungan sekolah. Delapan standar yang diterapkan oleh MASPA merupakan rangkaian kegiatan yang termaktub dalam pasal 35 ayat 1 tentang standar nasional pendidikan yang didukung Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Keempat, para pendidik di MASPA sebagian memberlakukan standar baku dalam pembelajaran. Karena itu, diperlukan adanya perangkat-perangkat yang lebih siap agar ketidaksesuaian antara kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan fakta di lapangan.

Para pendidik di MASPA melakukan upaya-upaya untuk mengembangkan kualitas pendidikan di lembaga yang dikelola. Upaya tersebut meliputi: (1) menambah kegiatan jam pembelajaran melalui belajar malam terjadwal dan didampingi guru sesuai dengan jadwalnya, (2) menjadwalkan kegiatan ekstrakurikuler dengan pilihan yang beragam, (3) menjadwalkan pelajaran-pelajaran agama berbasis pesantren pada sore hari, dan (4) menyelenggarakan rapat koordinasi guru mata

pelajaran dalam MGMP. Kondisi tersebut sesuai dengan pasal 50 ayat 92 UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 tentang SNP.

Kelima, para pendidik di MASPA melakukan upaya terus-menerus untuk meningkatkan daya saing sekolah. Standar pengelolaan satuan pendidikan idealpun disyaratkan dalam pelaksanaan pembelajaran sehari-hari. Upaya tersebut dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak terkait seperti Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Pengelola Yayasan serta Wali Murid untuk memberikan monitoring secara berkala. Kondisi tersebut sebenarnya sesuai dengan pasal 50 ayat 2 UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 tentang pengelolaan satuan pendidikan dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan.

Berdasarkan analisa peneliti, secara keseluruhan pelaksanaan program mutu pendidikan di MASPA telah didasarkan pada UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003. Hanya saja, para pendidik di MASPA belum mengklasifikasikan secara jelas sesuai dengan poin-poin yang tertera dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003. Meskipun demikian, tidak berarti para pendidik di MASPA tidak mengalami kendala dalam menjalankan aktivitas di sekolah. Kendala yang sering dihadapi adalah konsistensi dan kontinuitas.

Konsistensi dan kontinuitas menjadi problem ketika para pendidik di MASPA tidak mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan di sekolah secara berkelanjutan. Hal tersebut terjadi, karena perkembangan MASPA dari periode ke periode mengalami peningkatan, meskipun peningkatan yang dialami secara bertahap.

Peningkatan tersebut dapat diidentifikasi melalui: (1) tingkat kehadiran siswa yang mencapai 90%, (2) peningkatan Kriteria Ketuntasan

Minimal (KKM), (3) tingkat kehadiran pendidik yang mencapai 90%, dan (4) persentase ketuntasan belajar yang semakin baik.

4.2. Konsep Program Mutu *Good Governance* dalam Meningkatkan Budaya Akademik Sekolah di Madrasah Aliyah Sunan Pandanaran

Konsep program mutu *good governance* dalam meningkatkan budaya akademik di Madrasah Aliyah Sunan Pandanaran (MASPA) perlu didasarkan pada dasar-dasar program mutu pendidikan. Dasar-dasar tersebut yaitu (1) komitmen dan perubahan, (2) pemahaman yang jelas tentang kondisi yang ada di sekolah, (3) mempunyai visi yang jelas terhadap kemajuan sekolah, dan (4) mempunyai rencana yang jelas untuk kemajuan sekolah. Empat prinsip dasar tersebutlah yang perlu dijadikan dasar konsep program mutu pendidikan di MASPA.

Pertama, komitmen dan perubahan. Dasar tersebut perlu dijadikan pondasi awal konsep mutu *good governance*. Dasar tersebut telah direalisasikan dalam bentuk: (1) penyesuaian kurikulum, (2) mengedepankan nilai akhlak mulia, (3) pengembangan kurikulum secara berkala, dan (4) evaluasi program peningkatan pendidikan secara berkala di MASPA.

Kedua, pemahaman yang jelas tentang kondisi yang ada di sekolah. Dasar tersebut perlu dijadikan sebagai pondasi kedua konsep mutu *good governance*. Dasar tersebut telah direalisasikan dalam bentuk: (1) penyusunan kurikulum muatan lokal, (2) penyusunan dan penyelenggaraan orientasi siswa pada awal tahun ajaran, (3) penyusunan dan penyelenggaraan pembekalan siswa kelas XII selama 2 minggu pasca Ujian Nasional di MASPA.

Ketiga, mempunyai visi yang jelas terhadap kemajuan sekolah. Dasar tersebut perlu dijadikan sebagai pondasi ketiga konsep mutu *good*

governance. Dasar tersebut telah direalisasikan dalam bentuk: (1) mengembangkan pola hidup mandiri ala pesantren, (2) meningkatkan prestasi dengan penyelenggaraan ekstrakurikuler serta mengikuti kegiatan lomba dari tingkat wilayah sampai nasional, (3) mengembangkan sistem pembelajaran berbasis teknologi multi media, (4) menetapkan standarisasi kemampuan membaca al-Qur'an baik kemampuan hafalan (*bi al-hifdzi*) maupun kemampuan bacaan (*bi al-nadzri*) oleh MASPA.

Keempat, mempunyai rencana yang jelas untuk kemajuan sekolah. Dasar tersebut perlu dijadikan sebagai pondasi keempat konsep mutu *good governance*. Dasar tersebut telah direalisasikan dalam bentuk: (1) program kerja madrasah dibuat jangka pendek (tahunan), menengah (2 tahunan), dan panjang (4 tahunan); dan (2) setiap periode dievaluasi secara berkala, dianalisis serta dipresentasikan melalui rapat bersama. Paparan di atas merupakan klasifikasi konsep mutu *good governance* dan diterapkan di MASPA Sardono-harjo Ngaglik Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Meskipun tidak semua pendidik menyadari bahwa kajian tersebut merupakan kajian mutu *good governance*.

Pemaparan-pemaparan di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan konsep mutu sudah dijalankan di MASPA. Hanya saja, klasifikasi secara pasti terkait bagian-bagian kajian mutu belum diidentifikasi dengan baik. Karena itu, dengan identifikasi yang dilakukan peneliti diharapkan pelaksanaan mutu di MASPA semakin baik.

Di samping itu, peneliti berharap evaluasi berkala terhadap mutu pendidikan perlu dilakukan di MASPA. Evaluasi tersebut dapat dijadikan sebagai kontrol kualitas pembelajaran di MASPA.

C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah penulis paparkan sebelumnya maka kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Implementasi program mutu pendidikan di MASPA didasarkan pada dasar hukum pelaksanaan sistem mutu UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003. Secara keseluruhan tingkat pelaksanaan program mutu pendidikan di MASPA diturunkan dalam beberapa kegiatan. Hanya saja klasifikasi kegiatan berdasarkan konsep mutu masih belum jelas/optimal. Karena itu, peneliti mengidentifikasi dan mengklasifikasikan kegiatan-kegiatan tersebut berdasarkan konsep mutu. Peneliti menemukan fakta bahwa dari periode ke periode mutu pendidikan di MASPA mengalami peningkatan yang menggembirakan. Meskipun belum bisa dikatakan baik sekali. Fakta tersebut dapat diidentifikasi melalui: (a) tingkat kehadiran siswa $\pm 90\%$, (b) peningkatan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), (c) tingkat kehadiran pendidik yang lebih dari 90%, dan (d) persentase ketuntasan belajar yang baik.
2. Konsep program mutu *good governance* dalam meningkatkan budaya akademik di MASPA perlu didasarkan pada empat dasar program mutu pendidikan, yaitu: (a) komitmen dan perubahan, (b) pemahaman yang jelas tentang kondisi yang ada di sekolah, (c) mempunyai visi yang jelas terhadap kemajuan sekolah, dan (d) mempunyai rencana yang jelas untuk kemajuan sekolah. Empat dasar program mutu pendidikan tersebut telah direalisasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan di MASPA Sardono-harjo Ngaglik Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Hanya saja,

klasifikasi kegiatan masih belum jelas. Karena itu, peneliti melakukan identifikasi kegiatan sehingga panduan pelaksanaan konsep mutu di MASPA menjadi lebih mudah. Di samping peneliti berharap adanya evaluasi berkala terhadap mutu pendidikan di MASPA Sardonoarjo Ngaglik Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sedangkan berdasarkan uraian pembahasan, hasil wawancara dengan Kepala MASPA dan kesimpulan dalam penelitian ini dapat direkomendasikan beberapa aspek penting untuk menindaklanjuti program pengembangan MASPA terkait dengan pengendalian mutu pendidikan adalah mutu yang bersifat total atau disebut pengendalian mutu total, yang berarti pengendalian semua kegiatan pada semua bidang pendidikan oleh semua personil MASPA.

Beberapa langkah yang seyogyanya ditempuh oleh pimpinan madrasah untuk mensosialisasikan pengendalian mutu sekolah menengah atas, khususnya instrumen pengendalian mutu adalah sebagai berikut:

1. Persiapan dan pemahaman sistem pengendalian mutu pada tahun pertama.
2. Seluruh personalia madrasah terlibat dalam kegiatan persiapan, pelaksanaan dan pengendalian sesuai dengan kewenangannya secara proporsional.
3. Setiap personil di setiap Madrasah Aliyah memiliki buku "Pengendalian Mutu Madrasah Menengah". Apabila tidak memungkinkan, minimal pada setiap unit kerja ada satu buku yang setiap saat dapat dibaca, baik oleh pimpinan unit ataupun anggotanya

Pelaksanaan pengendalian mutu pendidikan di MASPA meliputi:

1. Pembuatan rencana program kerja dimulai dari program umum atau program jangka panjang sampai dengan program atau rencana kerja harian dikendalikan oleh Kepala Madrasah melibatkan guru-guru yang memiliki keahlian dalam hal tersebut.
2. Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan pada kegiatan, kinerja atau performansi, serta prestasi kerja dari unsur-unsur pimpinan, serta para pelaksana dalam pelaksanaan tugas-tugasnya sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Dalam hal ini pemantauan kegiatan totalitas terdiri dari: (a) pemantauan kegiatan baik di kelas maupun di ruang praktikum mata pelajaran, (b) pemantauan kegiatan pembinaan siswa dan bimbingan konseling, (c) pemantauan kegiatan bidang kurikulum, (d) pemantauan kegiatan belajar di perpustakaan, (e) pemantauan kegiatan pengumpulan data internal dan eksternal, (f) pemantauan kegiatan pengembangan sistem informasi pendidikan, (g) pemantauan kegiatan pembinaan penggunaan anggaran biaya, (h) pemantauan kegiatan pengembangan sarana prasarana, dan fasilitas pendidikan, (i) pemantauan kegiatan kerja sama, layanan, dan hubungan dengan luar, (j) pemantauan kegiatan penerimaan siswa, layanan lanjutan studi dan penelusuran lulusan, dan (k) analisis hasil pemantauan terutama pada laporan pemantauan dihimpun oleh penanggung jawab kegiatan untuk kemudian ditelaah dan dianalisis satu-persatu.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- BSNP. 2006. *Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional
- Bungins, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Idrus, Muhammad. 2007. *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. Yogyakarta: UII Press.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Erlangga.
- Subagyo, Joko. 1999. *Metode Penelitian: dalam teori dan praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Suryadi Prawirosentono. 2002. *Filosofi Baru Tentang Manajemen Mutu Terpadu*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syaodih, Nana Sukmadinata. 2006. *Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah (Konsep, Prinsip, dan Instrumen)*. Bandung: Refika Aditama.
- Wiratno, Tri Aru. 2007. *Sekolahku Rumahku*. Jakarta: Kepustakaan Majelis Budaya Rakyat.